



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

EDISI 1



LKPJ 2025



 DINAS KOMINFO LAMBAR

 @KOMINFOLAMBAR

 DISKOMINFO LAMBAR





KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan dalam satu tahun terakhir. Dimana Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) dimaksudkan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang dan kami menyadari dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawab ini masih banyak yang perlu mendapat penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk sebuah kemajuan dan kesempurnaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini.



Lampung Barat, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

Burlianto Eka Putra, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP 197109241998031005



DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	4
1.3 Data Umum Daerah	10
Bab II Perubahan Penjabaran APBD	16
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
Yang Menjadi Kewenangan Daerah	19
3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	19
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun	
Anggaran Sebelumnya	19
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	
dan Penugasan	20
4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan	20
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas	
Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	20
Bab V Penutup	21
Lampiran 1	22
Lampiran 2	41
Lampiran 3	42



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah Perkecamatan	11
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	13
Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kilat Penjenjangan ..	14
Tabel 2.1. Perubahan Penjabaran APBD Dinas Kominfo	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Gambar 1.2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	14
Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kilat Penjenjangan	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 - 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat;
28. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
29. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tanggal 24 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika).

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Mengacu pada visi Pembangunan Jangka Panjang Indonesia Tahun 2025 – 2045 dan visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Barat 2025 – 2045, untuk menghadapi tantangan selama 5



(lima) tahun periode 2025-2029 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tujuan:

1. Menyusun perumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu empat tahun.
2. Menyediakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan, dan sasaran RPJMD.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan pagu sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi RPJMD tahun 2025-2029 disamping selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat, juga selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **“Kabupaten Lampung Barat Yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, Dan Berkelanjutan”**.



Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

“Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegak, Inovatif, Adil Makmur dan Merata (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang :

A. HEBAT

1. HARMONI,

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.

2. ELOK,

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosialkemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.

3. BERBUDAYA,

Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan



budaya dan seni dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.

4. **AMAN,**

Bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas.

5. **TAQWA,**

Bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek Pembangunan

B. SETIA

1. **SEHAT DAN CERDAS,**

Mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

2. **TEGAS DAN INOVATIF,**

engandung arti sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti, serta membangun proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.

3. **ADIL, MAKMUR DAN MERATA,**

Masyarakat Kabupaten Kabupaten Lampung Barat yang dapat menikmati pembangunan secara merata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk



mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan “Lampung Barat Hebat dan Setia” sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Barat 2025-2029, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1) **Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan Berbudaya.**

Konsep Lampung Barat sehat dan cerdas sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik dan memastikan akses kesehatan untuk rakyat agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan kelima misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Lampung Barat yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang, serta memajukan dan Melestarikan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

2) **Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.**

Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan



oleh petani, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.

3) **Birokasi yang Amanah, Menjunjung Tinggi Hukum dan Berkeadaban.**

Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak serta membangun proses kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

4) **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Berkelanjutan.**

Misi ini bermakna memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan social ekonomi dan upaya konservasi

5) **Masyarakat Beriman dan Bertakwa, Harmonis dengan Semangat Bergotong Royong.**

Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

6) **Infrastruktur Mantap,**

Membangun infrastruktur yang mendukung aktifitas perekonomian secara adil dan merata di seluruh wilayah.



1.3. Data Umum Daerah

Aspek geografi dan demografi

Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 September 1991. Pada tahun 2012, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran dengan dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, yang diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Kabupaten Lampung Barat pasca pemekaran, secara geografis terletak pada koordinat 04°51'26" – 05°20'26" Lintang Selatan (LS) dan 103°50'13" – 104°33'49" Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah ±210.799 Ha, atau 6,28 % dari luas administrasi Provinsi Lampung.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

Guna mendukung efektivitas dalam rentang kendali (*span of control*) penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunannya, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terbagi ke dalam 15 wilayah kecamatan, dengan 131 pekon (desa) dan 5 (lima) kelurahan. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Batu Brak (± 24.270,41 Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu (± 6.154,89 Ha).



Tabel 2.1. Luas Wilayah Perkecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Pekon	Kelurahan Juml.	Ibu Kota
1	Balik Bukit	15.853,15	10	2	Pasar Liwa
2	Sukau	14.585,56	10	0	Buay Nyerupa
3	Lumbok Seminung	10.891,42	11	0	Lumbok
4	Belalau	9.390,84	10	0	Kenali
5	Sekincau	11.508,50	4	1	Pampangan
6	Suoh	11.836,20	7	0	Sumber Agung
7	Batu Brak	24.270,41	11	0	Pekon Balak
8	Pagar Dewa	19.770,98	10	0	Basungan
9	Batu Ketulis	18.201,00	10	0	Bakhu
10	Bandar Negeri Suoh	23.839,54	10	0	Sri Mulyo
11	Sumber Jaya	13.098,93	5	1	Tugu Sari
12	Way Tenong	12.969,40	8	1	Mutar Alam
13	Gedung Surian	7.696,22	5	0	Gedung Surian
14	Kebun Tebu	6.154,89	10	0	Pura Jaya
15	Air Hitam	10.812,40	10	0	Semarang Jaya
Lampung Barat		210.799,62	131	5	Liwa

Sumber: Perda Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023

Ibukota Kabupaten Lampung Barat, berkedudukan di Liwa. Dalam Struktur Ruang, Liwa difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. Wilayah Kawasan Perkotaan Liwa mencakup 12 pekon dan kelurahan yang meliputi 8 pekon dan 2 kelurahan di Kecamatan Balik Bukit dan 2 (dua) pekon di Kecamatan Sukau, yaitu sebagian pekon Tanjung Raya dan Hanakau. Luas wilayah kawasan perkotaan Liwa ± **5.008,31 Ha.**



Gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, *asset*/modal dan unit usaha yang masih operasional. Per Desember 2025 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 26 Pegawai (PNS dan PPPK). Berikut data pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat per Desember 2025:

a. Berdasarkan tingkat pendidikan dari 26 orang ASN dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	6 orang
2	Sarjana Strata 1	18 orang
3	Sekolah Menengah Atas	2 orang

Sumber: Dokumen LKjIP Kominfo 2025

Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Dokumen LKjIP Kominfo 2025

- b. Berdasarkan kepangkatan/golongan dari 26 Pegawai (ASN) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV.c	1 orang
2	Pembina Tingkat I	IV.b	1 orang
3	Pembina	IV.a	3 orang
4	Penata Tingkat I	III.d	7 orang
5	Penata	III.c	2 orang
6	Penata Muda Tingkat I	III.b	3 orang
7	Penata Muda	III.a	5 orang
8	Pengatur Tingkat I	II.d	1 orang
9	Pratama	IX	3 orang

Sumber: Dokumen LKjIP Kominfo 2025

Gambar 1.2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan



Sumber: Dokumen LKjIP Kominfo 2025

- c. Berdasarkan pendidikan kilat penjenjangan yang pernah diikuti, maka dari 26 orang Pegawai (PNS) dapat dirinci sebagai berikut:

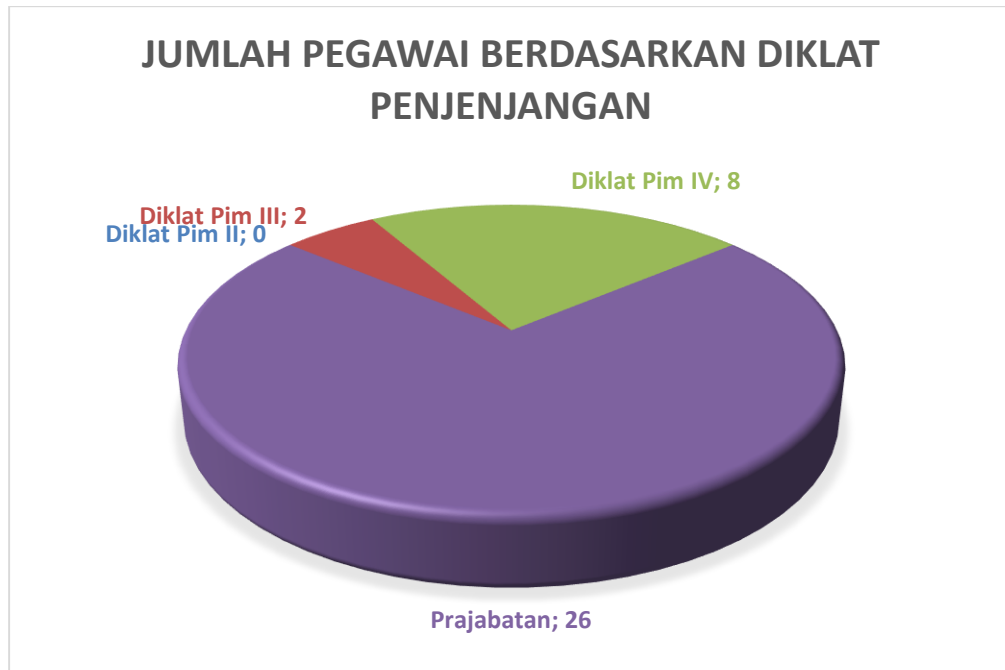
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Kilat Penjenjangan

No	Pendidikan Kilat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat Pim II	0 orang
2	Diklat Pim III	2 orang
3	Diklat Pim IV	8 orang
4	Prajabatan	26 orang

Sumber: Dokumen LKjIP Kominfo 2025



Gambar 1.3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kilat Penjenjangan



Sumber: Dokumen LKjIP Kominfo 2025



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Seiring dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan, perubahan anggaran merupakan langkah yang sering diperlukan guna menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan yang ada. Proses perubahan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Perubahan penjabaran APBD dapat terjadi akibat adanya faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah, seperti perubahan kebijakan pusat, situasi ekonomi daerah, serta kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan harus melalui prosedur yang transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan perubahan anggaran dengan pagu anggaran murni sebesar Rp.8.214.129.006 dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.7.353.443.743 atau berkurang sebesar Rp.860.685.263. Perubahan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Perubahan Penjabaran APBD Dinas Kominfo

No	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp23.214.700,00	Rp19.150.200,00	(Rp4.064.500,00)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp6.045.500,00	Rp3.214.000,00	(Rp2.831.500,00)
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp4.789.300,00	Rp1.948.800,00	(Rp2.840.500,00)
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp5.235.000,00	Rp2.265.000,00	(Rp2.970.000,00)



No	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp4.756.500,00	Rp3.575.500,00	(Rp1.181.000,00)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp2.105.000,00	Rp1.170.000,00	(Rp935.000,00)
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.999.900,00	Rp6.333.900,00	(Rp1.666.000,00)
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.706.818.546,00	Rp2.616.465.883,00	(Rp90.352.663,00)
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp2.500.000,00	Rp1.344.000,00	(Rp1.156.000,00)
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp2.030.000,00	Rp1.085.000,00	(Rp945.000,00)
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp2.305.000,00	Rp1.177.000,00	(Rp1.128.000,00)
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp3.903.100,00	Rp2.762.300,00	(Rp1.140.800,00)
13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp4.333.500,00	Rp2.914.300,00	(Rp1.419.200,00)
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp36.930.000,00	Rp84.835.000,00	Rp47.905.000,00
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp31.704.000,00	Rp27.574.000,00	(Rp4.130.000,00)
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp161.975.000,00	Rp82.835.000,00	(Rp79.140.000,00)
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.295.000,00	Rp2.230.000,00	(Rp1.065.000,00)
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp40.381.000,00	Rp42.336.000,00	Rp1.955.000,00
19	Relasi Media	Rp2.628.372.000,00	Rp2.145.964.400,00	(Rp482.407.600,00)
20	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp104.003.400,00	Rp75.436.600,00	(Rp28.566.800,00)
21	Pelayanan Informasi Publik	Rp438.034.800,00	Rp460.934.600,00	Rp22.899.800,00



No	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
22	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp82.787.600,00	Rp60.546.000,00	(Rp22.241.600,00)
23	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp89.316.200,00	Rp106.412.400,00	Rp17.096.200,00
24	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Rp27.680.000,00	Rp13.968.000,00	(Rp13.712.000,00)
25	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp72.012.000,00	Rp30.139.000,00	(Rp41.873.000,00)
26	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp316.014.000,00	Rp359.395.000,00	Rp43.381.000,00
27	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp328.836.500,00	Rp308.617.500,00	(Rp20.219.000,00)
28	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp21.714.000,00	Rp0,00	(Rp21.714.000,00)
29	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp101.287.000,00	Rp131.425.400,00	Rp30.138.400,00
30	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp110.758.100,00	Rp39.605.600,00	(Rp71.152.500,00)
31	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp222.967.000,00	Rp121.251.800,00	(Rp101.715.200,00)
32	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp60.314.000,00	Rp36.820.200,00	(Rp23.493.800,00)
J U M L A H		Rp.7.654.417.646	Rp.6.793.732.383	Rp.860.685.263

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kominfo 2025



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Pagu Anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp. 7.353.443.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.075.617.239,- atau sebesar 96,22% dari pagu anggaran yang ada. (Lampiran 1)

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 menetapkan Kebijakan Strategis, “Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)”, dalam rangka melindungi aset informasi, mengelola risiko keamanan informasi, menjamin keberlangsungan layanan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang aman dan andal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. (Lampiran 2)

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.3.1. Rekomendasi dan Tindak Lanjut (Lampiran 3)



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas-pembantuan

Nihil

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Nihil



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bagian yang penting dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap organisasi perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran kepada Bupati. Laporan ini juga sangat bermanfaat terutama dalam mengukur kinerja dan capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Hal ini merupakan tanggungjawab secara moril dan material terhadap seluruh rangkaian program/kegiatan instansi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025 yang berpedoman pada RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA. Secara umum, anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 7.353.443.743,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.075.617.239,- atau sebesar 96,22%.

Demikian Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



diw a, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

Burlianto Eka Putra, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP 197109241998031005



Lampiran 1

3.12 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Melaksanakan Penyebarluasan Informasi bagi masyarakat sampai ke tingkat pekon, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas wawasan masyarakat dan mempermudah akses informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip OPD, 82,50 Poin	Nilai Sakip OPD, 82,50 Poin			
			Melaksanakan Pelayanan Bagi Masyarakat melalui pemanfaatan sarana dan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomen dari DPRD
			prasarana TIK, terutama dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat		Daerah yang disusun, 25 Dokumen	Daerah yang disusun, 25 Dokumen			
			Melaksanakan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 8 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Dokumen RKA-SKPD, 1 Dokumen	Dokumen RKA-SKPD, 1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, 1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, 1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, 1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				SKPD	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen, 1 Dokumen	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen, 1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, 1 Laporan			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 12 Laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi	Jumlah dokumen Administrasi			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Keuangan yang disusun, 4 Dokumen	Keuangan yang disusun, 4 Dokumen			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 26 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 26 orang/bulan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, 1 Laporan	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, 1 Laporan			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, 1 Dokumen			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun, 1 Dokumen	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun, 1 Dokumen			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, 1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, 1 Dokumen			
				Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang	Jumlah pegawai yang			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perangkat Daerah	dimonitoring dan dievaluasi, 26 orang	dimonitoring dan dievaluasi, 26 orang			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, 1 Dokumen			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadministrasian umum yang dilaksanakan, 6 Laporan	Jumlah pengadministrasian umum yang dilaksanakan, 6 Laporan			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, 11 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, 11 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Kantor	Kantor yang Disediakan, 4 Paket	Kantor yang Disediakan, 4 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, 11 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, 11 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, 3 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, 3 Dokumen			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, 12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu, 12 Laporan			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					SKPD, 12 Laporan	SKPD, 12 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, 4 Unit	Jumlah Paket Mabel yang Disediakan, 4 Unit			
				Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, 2 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, 2 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 4 Laporan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 4 Laporan			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2 Laporan (73,09%)	Realisasi dibawah 90% karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah,	Melakukan perencanaan anggaran lebih baik, sehingga anggaran dapat terserap sepenuhnya	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							tidak adanya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi menara tower sehingga tidak ada belanja paket/pengiriman atau realisasi 0%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, 3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, 3 Laporan (64,08%)	Realisasi fisik/output di bawah 90% karena telah sesuai dengan tagihan air, listrik dan telepon yang dibayarkan	Melakukan perencanaan anggaran lebih baik, sehingga anggaran dapat terserap sepenuhnya	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Disediakan, 1 Laporan	Disediakan, 1 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, 3 Jenis	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, 3 Jenis			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, 10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, 10 unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, 23 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, 23 unit (80,90%)	Realisasi fisik/output di bawah 90% karena telah sesuai dengan kebutuhan	Melakukan perencanaan anggaran lebih baik, sehingga anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							pemeliharaan baik genset maupun peralatan elektronik komputer maupun laptop.	dapat terserap sepenuhnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, 2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, 2 Unit			
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik, 70 Poin	Indeks Keterbukaan Informasi Publik, 70 Poin			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola, 6 Jenis	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola, 6 Jenis			
				Relasi Media	Jumlah	Jumlah			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverivikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, da 3. Aktif Dalam Relasi Media, 1 Laporan	Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverivikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, da 3. Aktif Dalam Relasi Media, 1 Laporan			
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo, 10 Komunitas	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo, 10 Komunitas			
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Sesuai Peraturan Perundangan, 1 Permohonan	Sesuai Peraturan Perundangan, 1 Permohonan			
				Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah, 1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah, 1 Rekomendasi			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesusi Kriteria/Juknis,	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesusi Kriteria/Juknis,			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					1 Media	1 Media			
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE, 50%	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE, 50%			
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Egovernment, 2 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Egovernment, 2 Dokumen			
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang Sudah di Tempatkan di Pusat Data Nasional, 2 Aplikasi	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang Sudah di Tempatkan di Pusat Data Nasional, 2 Aplikasi			
				Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda, 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda, 1 Laporan			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pembangunan dan/Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai Dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, 2 Aplikasi	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, 2 Aplikasi			
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/ Kota Cerdas, 27 Unit	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/ Kota Cerdas, 27 Unit			
				Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPE	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas, 27 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas, 27 Perangkat Daerah			
	Urusan			PROGRAM	Persentase	Persentase			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Pemerintahan Bidang Statistik			PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan, 85%	Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan, 85%			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, 2 Dokumen	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, 2 Dokumen			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik, 28 orang	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik, 0 orang			
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu, 60 Persentase	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu, 60 Persentase			
	Urusan Pemerintahan			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Jenis	Persentase Jenis			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
	Bidang Persandian			N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Komunikasi Sandi yang diamankan, 100%	Komunikasi Sandi yang diamankan, 100 %			
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, 4 Laporan/ Dokumen	Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, 4 Laporan/ Dokumen			
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, 1 Laporan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, 1 Laporan			
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis			



No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Elektronik dan Non Elektronik, 4 Laporan	Elektronik dan Non Elektronik, 4 Laporan			
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi, 7 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi, 7 Perangkat Daerah			



Lampung Barat, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

Burlianto Eka Putra, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP 197109241998031005



Lampiran 2

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Melindungi aset informasi, mengelola risiko keamanan informasi, menjamin keberlangsungan layanan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang aman dan andal

L i w a, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,



Burlianto Eka Putra, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP 197109241998031005



Lampiran 3

3.3.1 Tindak Lanjut Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Barat 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat

No	Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
-	-	-	-

L i w a, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,



Burlianto Eka Putra, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP 197109241998031005



REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN : Non Urusan
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Tingkat Pencapaian	SKPD	Belanja Langsung			Keterangan
		Indikator Keluaran	Pelaksana	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	
1	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Rp 7.353.443.743	Rp 7.075.617.239	96,22	-
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai saki OPD	Dinas Kominfo	Rp 3.073.607.243	Rp 2.933.694.856	95,45	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Kominfo	Rp 37.657.400	Rp 37.648.400	99,98	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Rp 19.150.200	Rp 19.141.200	99,95	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Rp 3.214.000	Rp 3.214.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Rp 1.948.800	Rp 1.948.800	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Rp 2.265.000	Rp 2.265.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Rp 3.575.500	Rp 3.575.500	100,00	-



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	Rp	1.170.000	Rp	1.170.000	100,00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Rp	6.333.900	Rp	6.333.900	100,00	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Dinas Kominfo	Rp	2.620.071.883	Rp	2.501.284.334	95,47	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Rp	2.616.465.883	Rp	2.497.678.334	95,46	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Rp	1.344.000	Rp	1.344.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kominfo	Rp	1.085.000	Rp	1.085.000	100,00	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Kominfo	Rp	1.177.000	Rp	1.177.000	100,00	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	Dinas Kominfo	Rp	2.762.300	Rp	2.762.300	100,00	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kominfo	Rp	2.762.300	Rp	2.762.300	100,00	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dimonitoring dan dievaluasi	Dinas Kominfo	Rp	2.914.300	Rp	2.914.300	100,00	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kominfo	Rp	2.914.300	Rp	2.914.300	100,00	-



5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadministrasian umum yang dilaksanakan	Dinas Kominfo	Rp	215.026.800	Rp	211.007.628	98,13	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	Rp	4.658.000	Rp	4.658.000	100,00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	Rp	84.835.000	Rp	83.739.500	98,71	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kominfo	Rp	27.574.000	Rp	25.122.000	91,11	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Kominfo	Rp	3.060.000	Rp	3.060.000	100,00	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo	Rp	12.064.800	Rp	12.064.800	100,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Rp	82.835.000	Rp	82.363.328	99,43	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kominfo	Rp	6.800.000	Rp	6.800.000	100,00	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo	Rp	71.766.000	Rp	60.354.688	84,10	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo	Rp	2.230.000	Rp	1.630.000	73,09	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kominfo	Rp	27.200.000	Rp	17.428.688	64,08	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kominfo	Rp	42.336.000	Rp	41.296.000	97,54	-



7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Kominfo	Rp	116.608.560	Rp	110.923.206	95,12	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kominfo	Rp	79.300.000	Rp	78.833.206	99,41	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kominfo	Rp	27.318.560	Rp	22.100.000	80,90	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kominfo	Rp	9.990.000	Rp	9.990.000	100,00	-
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Rp	2.849.294.000	Rp	2.755.036.819	96,69	-
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola	Dinas Kominfo	Rp	2.849.294.000	Rp	2.755.036.819	96,69	-
	Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo. da	Dinas Kominfo	Rp	2.145.964.400	Rp	2.084.866.266	97,15	-
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Rp	75.436.600	Rp	74.706.100	99,03	-
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	Dinas Kominfo	Rp	460.934.600	Rp	442.047.568	95,90	-
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Rp	60.546.000	Rp	50.145.842	82,82	-
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesusi Kriteria/Juknis	Dinas Kominfo	Rp	106.412.400	Rp	103.271.043	97,05	-



III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan SPBE	Dinas Kominfo	Rp	1.101.439.500	Rp	1.083.711.804	98,39	-
1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Egovertment	Dinas Kominfo	Rp	1.101.439.500	Rp	1.083.711.804	98,39	-
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang Sudah di Tempatkan di Pusat Data Nasional 2 Aplikasi	Dinas Kominfo	Rp	13.968.000	Rp	13.442.847	96,24	-
	Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Dinas Kominfo	Rp	30.139.000	Rp	30.129.700	99,97	-
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Rp	359.395.000	Rp	359.344.900	99,99	-
	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/ Kota Cerdas	Dinas Kominfo	Rp	308.617.500	Rp	292.580.763	94,80	-
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas	Dinas Kominfo	Rp	389.320.000	Rp	388.213.594	99,72	-
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan	Dinas Kominfo	Rp	131.425.400	Rp	129.639.900	98,64	-
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	Rp	131.425.400	Rp	129.639.900	98,64	-
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu	Dinas Kominfo	Rp	131.425.400	Rp	129.639.900	98,64	-
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase Jenis Komunikasi Sandi yang diamankan	Dinas Kominfo	Rp	197.677.600	Rp	173.533.860	87,79	-



1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Rp	197.677.600	Rp	173.533.860	87,79	-
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo	Rp	39.605.600	Rp	37.307.501	94,20	-
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Kominfo	Rp	121.251.800	Rp	103.566.159	85,41	-
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	Rp	36.820.200	Rp	32.660.200	88,70	-



L i w a, 30 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

Burhianto Eka Putra, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197109241998031005